

ABSTRAK

DUWILESTARI, 126103203286, Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Gempolan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Pembimbing : Muksin, M.H.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Aspirasi Masyarakat, Pembangunan Desa

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang maksimalnya peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawal aspirasi masyarakat terutama dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Kurang maksimalnya peran BPD membuat aspirasi masyarakat tidak bisa diwujudkan dalam aspek pembangunan Desa yang pada akhirnya bisa merugikan masyarakat. Padahal Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hakikatnya sebagai lembaga legislatif desa yang bertugas menetapkan kebijakan desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan tidak terjadi seperti yang diharapkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? 2) Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa? 3) Bagaimana proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gempolan yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. BPD Desa Gempolan menampung usulan-usulan dari masyarakat, setelah itu usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, kemudian hasil evaluasi itu yang akan dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam Peraturan Desa. Selain itu, BPD Desa Gempolan juga bertugas dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan untuk kepentingan pembangunan di desa, dan lain sebagainya. BPD Desa Gempolan juga bertugas untuk mengawasi kinerja Kepala Desa. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara monitoring atau memantau kinerja Kepala Desa, mengevaluasi kinerja Kepala Desa, serta memeriksa dan menilai kinerja Kepala Desa. 2) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gempolan dalam pembangunan desa sangat penting. Peran penting BPD Desa Gempolan yaitu mengkoordinasikan perencanaan pembangunan desa dalam segala bidang baik itu berasal dari masyarakat maupun dari pemerintah. BPD Desa Gempolan mempunyai peranan dalam pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Salah satu peran

penting BPD dalam perencanaan pembangunan desa adalah kemampuan BPD dalam menggali, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi ini membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan demi kepentingan pembangunan desa. 3) Proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gempolan diawali dengan diadakannya musyawarah tingkat RT yang bertujuan untuk menyiapkan materi pembahasan dalam musyawarah desa. Selanjutnya dilanjutkan dengan musyawarah desa, berguna sebagai wadah dalam pengumpulan aspirasi masyarakat di tingkat RT yang sudah dilakukan sebelumnya sekaligus wadah dalam penyatuan gagasan dari seluruh RT. Hasil dari musyawarah desa ini adalah hasil final dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dan dirundingkan bersama. Hasil yang didapatkan dari musyawarah desa ini didasarkan atas dasar mufakat atau kesepakatan bersama dengan BPD. Untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Desa.

ABSTRACT

DUWI LESTARI, 126103203286, The Role of the Village Consultative Body in Conveying Community Aspirations in Village Development (Case Study of Gempolan Village, Pakel District, Tulungagung Regency), Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung, 2024, Supervisor: Muksin, M.H.

Keywords: Village Consultative Body, Community Aspirations, Village Development

This research is based on the lack of optimal role of the Village Consultative Body (BPD) in channeling community aspirations, especially in planning and implementing development, due to many factors. The lack of optimal role of BPD makes the community's aspirations unable to be realized in the aspect of village development which can ultimately harm the community. The Village Consultative Body (BPD) is a village legislative institution tasked with setting village policies and accommodating and channeling the community's aspirations with the Village Head. This institution is essentially a partner of the village government which has an equal position in organizing village government affairs, development, and community empowerment. However, based on observations in the field, it did not happen as expected.

The formulation of the problem in this study is: 1) What are the duties and authorities of the Village Consultative Body (BPD)? 2) What is the role of the Village Consultative Body (BPD) in conveying the community's aspirations in village development? 3) What is the process of conveying community aspirations to the Village Consultative Body (BPD)?

The research method used by the researcher is an empirical juridical research mode or field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. Empirical juridical research is legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in *action* in every specific legal event that occurs in society.

The results of this study show that: 1) The duties and authorities of the Village Consultative Body (BPD) of Gempolan Village are to discuss and agree on the draft village regulations with the Village Head. The Gempolan Village BPD accommodates proposals from the community, after which the proposals are discussed and evaluated, then the evaluation results will be determined together in the form of a draft to be subsequently formulated in the Village Regulation. In addition, the Gempolan Village BPD is also tasked with accommodating and channeling the community's aspirations. The distribution of these aspirations helps the community in expressing opinions, and proposals for the benefit of development in the village, and so on. The Gempolan Village BPD is also tasked with supervising the performance of the Village Head. The supervision is carried out by monitoring or monitoring the performance of the Village Head, evaluating the performance of the Village Head, and checking and assessing the performance of the Village Head. 2) The role of the Village Consultative Body (BPD) of Gempolan Village in village development is crucial. The important role of the Gempolan Village BPD is to coordinate village development planning in all fields, both from the community and from the government. BPD Gempolan Village has a role in village development including planning, implementation, and control of development that relies on the community and supervises the implementation of village development. One of the important roles of BPD in village development planning is the ability of BPD to explore, accommodate, and channel community aspirations. The distribution of this aspiration helps the community in expressing

their opinions and submitting proposals for the benefit of village development. 3) The process of conveying community aspirations to the Village Consultative Body (BPD) of Gempolan Village begins with the holding of an RT-level deliberation which aims to prepare discussion materials in the village deliberations. Furthermore, it was continued with village deliberations, useful as a forum for collecting community aspirations at the RT level that had been carried out previously as well as a forum for unifying ideas from all RTs. The results of this village deliberation are the final result of the community's aspirations that have been conveyed and negotiated together. The results obtained from this village deliberation are based on consensus or mutual agreement with BPD. It will then be conveyed to the Village Head.

خالصة

دوي ليستاري، 126103203286، دور الهيئة الاستشارية للقرية في نقل تطلعات المجتمع في تنمية القرية (دراسة حالة قرية جيمبولان، مقاطعة باكيل، مقاطعة تولونغونغ)، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة والقانون، جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية تولونغونغ، 2024، المشرف: موكسين، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: الهيئة الاستشارية القروية، تطلعات المجتمع، تنمية القرية

يستند هذا البحث إلى عدم وجود دور أمثل للهيئة الاستشارية القروية (بي دي) في توجيه تطلعات المجتمع ، وخاصة في تخطيط وتنفيذ التنمية ، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل. إن عدم وجود الدور الأمثل لاضطراب الشخصية الحدية يجعل تطلعات المجتمع غير قابلة للتحقيق في جانب تنمية القرية الذي يمكن أن يضر المجتمع في نهاية المطاف. والواقع أن الهيئة الاستشارية القروية هي أساسا مؤسسة تشريعية قروية مكلفة بوضع سياسات القرية واستيعاب تطلعات المجتمع المحلي وتوجيهها إلى رئيس القرية. وهذه المؤسسة هي أساسا شريك لحكومة القرية التي لها وضع متساو في تنظيم شؤون حكومة القرية والتنمية وتمكين المجتمعات المحلية. ومع ذلك ، بناء على الملاحظات في الميدان ، لم يحدث ذلك كما هو متوقع.

صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي: (1) ما هي واجبات وسلطات الهيئة الاستشارية القروية (بي دي)؟ (2) ما هو دور الهيئة الاستشارية القروية في نقل تطلعات المجتمع في تنمية القرية؟ (3) ما هي عملية نقل تطلعات المجتمع إلى الهيئة الاستشارية القروية؟

منهج البحث الذي يستخدمه الباحث هو منهج بحث قانوني تجريبي أو بحث ميداني ، وهو فحص الأحكام القانونية المعمول بها وما يحدث في الواقع في المجتمع. البحث القانوني التجريبي هو بحث قانوني يتعلق بإنفاذ أو تنفيذ الأحكام القانونية المعيارية في العمل في كل حدث قانوني محدد يحدث في المجتمع.

تظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) تتمثل واجبات وسلطات الهيئة الاستشارية القروية (بي دي) لقرية جيمبولان في مناقشة مشروع لوائح القرية والاتفاق عليه مع رئيس القرية. تستوعب بي دي في قرية جيمبولان المقترحات المقدمة من المجتمع ، وبعد ذلك تتم مناقشة المقترحات وتقييمها ، ثم يتم تحديد نتائج التقييم معا في شكل مسودة يتم صياغتها لاحقا في لائحة القرية. بالإضافة إلى ذلك ، تم تكليف بي دي في قرية جيمبولان أيضا باستيعاب وتوجيه تطلعات المجتمع. إن توزيع هذه التطلعات يساعد المجتمع في التعبير عن الرأي وتقديم المقترحات لصالح التنمية في القرية وما إلى ذلك. كما تم تكليف بي دي في قرية جيمبولان بالإشراف على أداء رئيس القرية. يتم الإشراف من خلال مراقبة أو مراقبة أداء رئيس القرية ، وتقييم أداء رئيس القرية ، وفحص وتقييم أداء رئيس القرية. (2) دور الهيئة الاستشارية القروية (بي دي) لقرية جيمبولان في تنمية القرية مهم للغاية. يتمثل الدور الهام ل بي دي في قرية جيمبولان في تنسيق تخطيط تنمية القرية في جميع المجالات ، سواء من المجتمع أو من الحكومة. تلعب قرية بي دي جيمبولان دورا في تنمية القرية بما في ذلك تخطيط وتنفيذ ومراقبة التنمية التي تعتمد على المجتمع وتشرف على تنفيذ تنمية القرية. أحد الأدوار المهمة لاضطراب الشخصية الحدية في تخطيط تنمية القرية هو قدرة اضطراب الشخصية الحدية على استكشاف تطلعات المجتمع واستيعابها وتوجيهها. يساعد توزيع هذا الطموح المجتمع في التعبير عن آرائهم ، وتقديم مقترحات لصالح تنمية القرية. (3) تبدأ عملية نقل تطلعات المجتمع إلى الهيئة الاستشارية القروية (بي دي) لقرية جيمبولان بعقد مداولات على مستوى آر تي تهدف إلى إعداد مواد مناقشة في مداولات القرية. وعلاوة على ذلك، استمر في المداولات القروية، وهو مفيد كمنتدى لجمع تطلعات المجتمع على مستوى آر تي الذي تم تنفيذه سابقا وكذلك كمنتدى لتوحيد الأفكار من جميع آر تي. نتيجة مداولات القرية هذه هي النتيجة النهائية لتطلعات المجتمع التي تم نقلها والتفاوض بشأنها معا. تستند النتائج التي تم الحصول عليها من مداولات القرية هذه إلى توافق الآراء أو الاتفاق المتبادل مع بي دي. ثم يتم نقلها إلى رئيس القرية.